

## BAB V PENUTUP

### V.1 Kesimpulan

Pembalakan liar dan perdagangannya merusak daya saing industri hutan yang bertanggung jawab dan menjadi salah satu penyebab kerugian pendapatan negara-negara penghasil kayu. Sejumlah negara telah berupaya mendorong penyebaran transparansi pasar terkait perdagangan kayu internasional menghentikan pembalakan liar, seperti negara-negara anggota G8 dan AS.

Proses integrasi di UE berpengaruh pada peningkatan ambisi UE dalam perlindungan lingkungan dan berkontribusi terhadap dinamika kebijakan lingkungannya. Sehingga saat pembalakan liar menjadi isu penting dalam lingkup internasional, UE menyadari untuk ikut serta bertanggung jawab. UE mengeluarkan *FLEGT Action Plan* sebagai rangkaian strategi untuk mendukung upaya internasional dalam menangani pembalakan liar yang mana menargetkan 60% kawasan hutan dunia.

Sebagai landasan dari *FLEGT Action Plan*, UE di tahun 2005 membangun skema kerjasama bilateral FLEGT-VPA, yaitu perjanjian perdagangan kayu dengan negara penghasil kayu untuk hanya memperdagangkan kayu dan produk kayu yang tidak bersumber dari tindakan ilegal. Mengingat proses negosiasi hingga ratifikasi memakan waktu yang panjang dan kepentingan serta dilandaskan pada sifat ‘sukarela’, mengakibatkan beberapa negara besar yang berkontribusi dalam perdagangan kayu memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Merespon adanya batasan tersebut, langkah lanjutan diambil dengan UE mengadopsi EUTR. Regulasi ini berorientasi pada sisi permintaan (impor) perdagangan kayu dan sebagai acuan agar negara-negara UE tetap kredibel dalam keterlibatannya dengan negara-negara mitra FLEGT-VPA.

Perumusan kebijakan EUTR diawali dari adanya kritik terhadap efektivitas FLEGT-VPA dari sejumlah pihak baik di level suprnasional maupun subnasional. Terutama dilontarkan oleh Parlemen yang menginginkan perubahan fokus dasar

hukum kebijakan VPA dari sebelumnya hanya perdagangan sebagai ranah wewenang Dewan, menjadi fokus kebijakan lingkungan agar dapat dilakukannya prosedur *codecision* atau terlibatnya Parlemen dalam setiap prosesnya.

EUTR berhasil diadopsi atas kebulatan suara di Parlemen dan Dewan melalui amandemen kompromi yang dicapai pada *trilogues* di antara ketiga lembaga UE. Parlemen dan Dewan memperdebatkan seberapa ketatnya regulasi yang akan dijalankan. Klausula larangan impor merupakan isu paling disoroti karena menyebabkan *zero sum* bagi negara-negara basis impor kayu, seperti Inggris, Spanyol, Denmark, Belanda, dan Belgia. Mereka merupakan kelompok negara yang aktif bernegosiasi di Dewan dikarenakan Presidensi Swedia dianggap telah membawa mayoritas negara lainnya melemahkan regulasi demi menyenangkan kepentingan bisnis. Perdebatan menjadi semakin rumit dengan terlibatnya NGO dan pihak-pihak dalam sektor industri memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Mereka mengkritik dan memberi tekanan terhadap lembaga UE.

Penegakan EUTR ditunda selama tiga tahun untuk mempersiapkan negara anggota dan sektor industri melaksanakan ketentuan dalam regulasinya. Selama periode itu, Komisi dimandatkan berkoordinasi dengan pemerintah nasional NGO, Asosiasi Perdagangan Kayu, dan Perusahaan Swasta merumuskan legislasi sekunder penunjang EUTR. Pengesahannya pun tidak sepihak diputuskan oleh Komisi, melainkan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Parlemen dan Dewan. Sampai dua tahun implementasinya, seluruh anggota telah melaksanakan ketetapan EUTR meski sebelumnya terdapat empat negara yaitu Spanyol, Yunani, Hungaria, dan Rumania mengalami keterlambatan dan harus menerima proses hukum dari Komisi.

Demikian, proses perumusan hingga diberlakukannya EUTR tidak terlepas dari aktivitas peran multiaktor dari lembaga supranasional, negara anggota, aktor subnasional, dan kelompok kepentingan. Pada setiap tahapan pembentukan

kebijakannya, mereka sama-sama bergantung pada peranan aktor lain. Sehingga, tidak memberikan pihak manapun memonopoli agenda di level UE.

## **V.2 Saran**

Sebagai regulasi yang menekankan pada sisi permintaan di internal UE, demikian dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk menjaga negara-negara UE tetap kredibel terhadap berjalannya FLEGT-VPA. Perumusan keseragaman dalam penerapan sanksi atau denda dapat menjadi awalan yang baik agar terhindarnya kegiatan produksi dan impor kayu bersumber ilegal oleh atau melalui negara-negara yang menerapkan sanksi ‘ringan’ dan berpengaruh pada berkurangnya efektivitas EUTR.